

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Kontrol Diri

1. Pengertian Kontrol Diri

Kontrol diri menurut Ghufron dan Risnawita merupakan suatu kecakapan individu dalam hal kepekaan untuk membaca situasi diri dan lingkungannya. Selain itu, kemampuan untuk mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi dalam melakukan sosialisasi diantaranya yaitu dengan mengendalikan perilaku, menarik perhatian, keinginan untuk merubah perilaku, dan menutupi perasaannya juga merupakan bagian dari kontrol diri.¹¹

Menurut McMullen, John. C sebagaimana yang dikutip oleh Widianoro mengatakan kontrol diri merupakan kondisi seseorang dimana ia bisa menahan diri untuk tidak melakukan perilaku yang dianggap melanggar aturan.¹² Dalam tulisan Maya Masyita Suherman, menurut Thomas, Nathan, dan Thinkel, Kontrol diri dapat membantu seseorang untuk berperilaku sesuai dengan standar pribadi atau sosial yang dapat menghindari sifat agresif. Hal ini berarti semakin tinggi

¹¹M. Nur Ghufron dan Rini Risnawati S, *Teori-Teori Psikologi* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2018), 21-22.

¹²Widianoro, Reiza Ekasyahputra Purawigena, dan Witrin Gamayanti, "Hubungan Kontrol Diri Dengan Kebahagiaan Santri Penghafal Al-Qur'an", *Jurnal Psikologi Integratif Prodi Psikologi UIN Sunan Kalijaga* 5, 1(2017), 13.

kontrol diri seseorang maka agresivitas seseorang menjadi semakin rendah.¹³

Hurlock menjelaskan dalam kutipan yang ditulis oleh Marimbuni bahwa siswa yang matang secara emosi akan memiliki kontrol diri yang baik, dan mampu mengekspresikan emosi dengan tepat sesuai dengan keadaan yang dihadapi, sehingga lebih mampu beradaptasi karena dapat menerima beragam orang, situasi, dan memberikan reaksi yang tepat sesuai dengan tuntutan yang dihadapi.¹⁴ Dengan demikian, ia akan meluapkan emosinya dengan menunggu waktu dan tempat yang lebih tepat. Dari beberapa pengertian kontrol diri menurut para tokoh di atas, dapat dikatakan kontrol diri ialah suatu keadaan dimana seseorang mampu untuk mengatur kondisi emosi dari segala perbuatan yang menyimpang dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan baik.

Terdapat dua alasan yang mengharuskan seorang individu mengontrol diri secara kontinu menurut Colhoun dan Acocella dalam buku yang ditulis oleh M. Nur Ghufron dan Rini Risnawati S yaitu:¹⁵

- a. Individu hidup bersama kelompoknya, sehingga dalam memuaskan keinginannya individu harus mengontrol perilakunya agar tidak mengganggu kenyamanan orang lain.

¹³Maya Masyita Suherman, "Efektivitas Strategi Permainan Dalam Mengembangkan Self-Control Siswa", *Jurnal Penelitian Pendidikan* 16, 2 (2016), 195.

¹⁴Marimbuni, "Kontribusi Konsep Diri Dan Kematangan Emosi Terhadap Penyesuaian Diri Siswa Dan Implikasinya Dalam Bimbingan Konseling", *Jurnal Bimbingan dan Konseling* 6, 2 (2017), 166–167.

¹⁵Risnawati S, *Teori-Teori Psikolog.*, 23.

- b. Masyarakat mendorong individu untuk konstan menyusun standar yang lebih baik untuk dirinya. Ketika berusaha memenuhi tuntutan, dibuatkan pengontrolan diri agar dalam mencapai tujuan standarnya individu tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menyimpang.

1. Aspek Kontrol Diri

Menurut Averill dalam tulisan Tira Pratama Amsari dan Rr. Dini Diah Nurhadianti, aspek-aspek kontrol diri dibedakan atas tiga kategori utama yaitu mengontrol perilaku (*Behavior Control*), mengontrol pikiran (*Cognitive Control*), dan mengontrol keputusan (*Decision Control*).¹⁶

a. Kontrol perilaku (*Behavior Control*)

Kontrol perilaku terjadi atas respon secara langsung mempengaruhi atau memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, kemampuan mengontrol perilaku dibagi ke dalam dua komponen, yaitu mengatur pelaksanaan (*regulated administration*) dan kemampuan memodifikasi stimulus (*stimulus modifiability*).

Kemampuan mengatur pelaksanaan pada seorang individu menentukan siapa yang mengendalikan situasi atau keadaan. Apakah dirinya sendiri atau aturan perilaku dengan menggunakan segenap kemampuannya dan jika

¹⁶Amsari Tira Pratama, "Kontrol Diri Dan Dukungan Sosial., 148.

dirasa tidak mampu, individu akan menggunakan sumber eksternal. Sedangkan kemampuan mengatur stimulus untuk mengetahui bagaimana dan kapan suatu stimulus yang tidak dikehendaki dihadapi.

b. Kontrol pikiran (*Cognitive Control*)

Ketika individu mendapatkan informasi tentang suatu keadaan yang tidak menyenangkan, ia dapat mengantisipasi keadaan tersebut dengan berbagai pertimbangan dan melakukan penilaian baik buruknya atau segi-segi positif negatifnya secara subjektif.

c. Kontrol keputusan (*Decision Control*)

Dalam fase ini, seseorang memilih hasil suatu tindakan berdasarkan hal yang telah diyakini atau disetujuinya sebelumnya. Kontrol diri dalam menentukan pilihan akan berfungsi baik dengan adanya kesempatan, kebebasan, atau kemungkinan pada diri individu untuk memilih berbagai kemungkinan tindakan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka untuk mengukur kontrol diri menggunakan aspek-aspek berikut ini:

- 1) Kemampuan mengontrol perilaku
- 2) Kemampuan mengontrol stimulus
- 3) Untuk mengantisipasi suatu peristiwa atau kejadian
- 4) Untuk menafsirkan suatu peristiwa atau kejadian

5) Untuk mengambil keputusan.¹⁷

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kontrol Diri

Sebagaimana faktor psikologis lainnya, kontrol diri dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri terdiri faktor internal (dari diri individu) dan faktor eksternal (lingkungan individu).¹⁸

Menurut Averill, usia dan pengetahuan juga turut memberikan kontribusi sebagai faktor yang mempengaruhi kemampuan kontrol diri.¹⁹ Terkait dengan pertumbuhan seseorang, kemampuan untuk mengontrol diri dapat membantu seseorang untuk mengendalikan diri dan mengatur perilakunya agar tidak menyimpang dari norma yang berlaku.

B. Kepatuhan

1. Pengertian Kepatuhan

Sebagaimana yang dikutip oleh Kusumadewi, dkk menurut Blass kepatuhan adalah sikap dan tingkah laku taat individu dalam arti mempercayai, menerima serta melakukan permintaan maupun perintah orang lain atau menjalankan peraturan yang telah ditetapkan.²⁰ Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan patuh apabila taat atas peraturan

¹⁷Risnawati S, *Teori-Teori Psikologi.*, 29-31.

¹⁸Risnawati S, *Teori-Teori Psikologi.*, 32.

¹⁹Nanik Handayani, "Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Narsisme Pada Remaja Pengguna Facebook", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2014), 3.

²⁰Kusumadewi, Hardjajani, and Priyatama, "Hubungan Antara Dukungan Sosial Peer Group Dan Kontrol Diri Dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan Pada Remaja Putri Di Pondok Pesantren Modern Islam Assalam Sukoharjo", (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta), 3.

yang berlaku dan siap untuk menerima konsekuensi ketika melanggarnya.

Kepatuhan terhadap norma sosial dapat dirumuskan sebagai sikap yang tunduk pada aturan-aturan dan nilai dalam kelompok sosial masyarakat dalam bentuk lisan maupun tulisan yang disepakati bersama dengan tulus. Agar setiap individu menjalankan perannya secara terstruktur dan seluruh kegiatannya berjalan dengan baik serta meninggalkan apa yang menjadi larangannya agar terhindar dari sanksi atau hukuman.

Diterapkannya hukuman atau yang biasa disebut dengan “*punishment*” dalam hal ini, dikatakan dapat memperlemah dan menekan perilaku. Dengan adanya hukuman perilaku menyimpang akan cenderung melemah dan tidak akan diulangi lagi.²¹ Akan tetapi juga perlu diperhatikan bahwa hukuman dapat menjadi *reinforcement* (penguatan) negatif apabila tidak dilakukan dengan tepat dan bijak. Sebaliknya, hukuman akan menjadi motivasi bila dilakukan dengan pendekatan edukatif.

2. Dimensi Kepatuhan

Blass menjelaskan bahwa aspek-aspek kepatuhan meliputi memercayai (*belief*), menerima (*accept*), dan melakukan (*act*)

²¹Ummi Sa'adah, “Hukuman Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kedisiplinan Santri Di Pondok Pesantren”, *Jurnal Pedagogik* 04, 1 (2017), 15.

sesuatu atas permintaan atau perintah orang lain.²² Kepatuhan dinilai sebagai perilaku positif yang menjadi sebuah pilihan. Artinya individu berhak memilih untuk melakukan, mematuhi, merespon secara kritis terhadap aturan, hukum, norma sosial, permintaan maupun keinginan dari seseorang yang memegang otoritas ataupun peran penting dalam suatu keadaan. Disisi lain, kepatuhan dalam dimensi pendidikan dinilai sebagai suatu kerelaan seseorang dalam tindakan terhadap perintah dan keinginan dari pemilik otoritas dalam hal ini bisa kyai, guru, ustadz, dan lain-lain.

Sebagaimana yang dikutip oleh Santalia dan Mira Hasti Hasmira Hasugian, Hirschi mengajukan beberapa proposisi teoritisnya, yaitu: Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu masyarakat untuk bertindak konform terhadap aturan atau tata tertib yang ada. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas merupakan bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional untuk meningkatkan individu agar tetap konform, seperti: keluarga, sekolah, atau institusi pendidikan dan kelompok-kelompok dominanlainnya.

Setiap individu harus belajar untuk konform dan tidak melakukan tindakan menyimpang atau kriminal. Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal. Masih berdasarkan proposisi Hirschi, kurang lebih ada empat unsur utama di dalam kontrol sosial

²²Priyatama, "Hubungan Antara Dukungan Sosial., 3.

internal, yaitu *attachement* (kasih sayang), *commitment* (tanggung jawab), *involvement* (keterlibatan atau partisipasi), dan *believe* (kepercayaan/keyakinan).²³ Keempat unsur tersebut berfungsi untuk mengendalikan perilaku seorang individu.

3. Faktor Kepatuhan

Menurut Brown faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap aturan sebagaimana dalam artikel yang ditulis oleh Amsari Tira Pratama diantaranya adalah :²⁴

- a. Faktor internal, meliputi: kontrol diri, kondisi emosi, dan penyesuaian diri terhadap lingkungan.
- b. Faktor eksternal, meliputi: keluarga, hubungan dengan teman sebaya, sistem sekolah yang berupa kebijakan peraturan, lingkungan sekolah, demografi (usia, suku, jenis kelamin), figur guru, dan hukuman yang diberikan oleh guru. Sama halnya dengan hasil penelitian Santalia Hasugian dan Mira Hasti Hasmira, salah satu faktor eksternal yang menjadikan seseorang menjadi patuh adalah adanya hukuman yang telah ditetapkan.²⁵

²³Santalia dan Mira Hasti Hasmira Hasugian, "Faktor-Faktor Penyebab Kepatuhan Siswa Kelas XI Dalam Mematuhi Peraturan Di SMA Negeri 2 Bukittinggi", *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan* 2, 3 (2019), 191-192.

²⁴Amsari Tira Pratama, "Kontrol Diri Dan Dukungan Sosial Teman Sebaya Dengan Kepatuhan Santri Dalam Melaksanakan Tata Tertib.", 148.

²⁵Hasugian, "Faktor-Faktor Penyebab Kepatuhan Siswa Kelas XI Dalam Mematuhi Peraturan Di SMA Negeri 2 Bukittinggi."

Menurut Sarbaini terdapat tiga aspek yang menentukan kepatuhan seseorang yaitu:²⁶

- a. Pemegang otoritas. Status yang tinggi dari figur yang memiliki otoritas memberikan pengaruh penting terhadap perilaku kepatuhan.
- b. Kondisi yang terjadi. Terbatasnya peluang untuk tidak patuh dan meningkatnya situasi yang menuntut kepatuhan.
- c. Orang yang mematuhi. Kesadaran seseorang untuk mematuhi peraturan karena individu mengetahui bahwa hal itu benar dan penting untuk dilakukan.

C. Peraturan Pondok Pesantren

Kata “Peraturan” dalam KBBI memiliki arti tataan (petunjuk, kaidah, atau ketentuan) yang dibuat untuk mengatur.²⁷ Menurut Hurlock sebagaimana yang dikutip oleh Suradi, peraturan bertujuan untuk membekali anak dengan pedoman berperilaku yang disetujui dalam situasi tertentu.²⁸ Seperti halnya dalam pesantren juga termuat hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan yang seharusnya dilakukan. Jadi dapat dikatakan bahwa adanya peraturan di pesantren tidak lain adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang menunjang terhadap kelancaran, ketertiban dan suasana yang damai dalam berbagai kegiatan yang ada di pesantren.

²⁶Amsari Tira Pratama, *Kontrol Diri Dan Dukungan Sosial.*, 147.

²⁷n.d., <https://kbbi.web.id> diakses tanggal 20 Februari 2020.

²⁸Suradi, “Pembentukan Karakter Siswa Melalui Penerapan Disiplin Tata Tertib Sekolah”, *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual* 2, 4 (November, 2017), 526.

Kata pesantren dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji...”. Dalam perkembangannya, pesantren sebagai tempat para santri menuntut ilmu terdapat beberapa tipologi pesantren. Dalam bukunya Ali Anwar, membagi tipologi pesantren menjadi tiga macam dengan mengikuti penelitian yang dilakukan oleh Abd.Mu’in yaitu salafiyah, khalafiyah, dan kombinasi. Pesantren salafiyah dicirikan sebagai lembaga yang memfokuskan pada *tafaqquh fi ad-dīn*, pengkajian kitab-kitab klasik, menggunakan metode bandongan, sorogan, maupun klasikal. Untuk pesantren khalafiyah merupakan pesantren yang mengadopsi sistem pendidikan klasikal dengan kurikulum yang tertata, dan mengintegrasikan pengetahuan umum. Sedangkan pesantren kombinasi dari perpaduan ciri-ciri pesantren salafiyah dan khalafiyah.²⁹

Berangkat dari konsep di atas, banyak lembaga pesantren yang memilih menerapkan hukuman atau dalam istilah pesantren biasa disebut dengan *ta'zīr* sebagai salah satu upaya untuk mendisiplinkan santrinya. Dalam Undang-undang pesantren pasal 40 menyatakan bahwa dakwah di dalam pesantren harus menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat.³⁰ Berbagai upaya dilakukan lembaga untuk membentuk kepribadian santri, seperti halnya pembinaan aqidah, ibadah, mental bermasyarakat, akhlak, intelektual, perasaan dan kejiwaan, etika seksual, bahkan jasmani dan kesehatan santri juga diperhatikan dalam dunia

²⁹Ali Anwar, *Pembaruan Pendidikan Di Pesantren Lirboyo Kediri*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 27.

³⁰“UU 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren” diakses tanggal 17 Desember 2019.

pesantren.³¹ Berangkat dari tujuan tersebut, *ta'zīr* diberlakukan untuk menindak lanjuti berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh santri, agar ada efek jera atas kesalahan yang diperbuatnya.

Ta'zīr atau hukuman merupakan langkah akhir yang dapat diberikan kepada peserta didik sebagai solusi terakhir dalam memodifikasi perilaku seseorang yang menyimpang terhadap kebijakan.³² Sebagaimana yang dikutip oleh Widi Widayatullah dalam artikelnya, menurut Zamakshary Dhofier tujuan utama dari pendekatan *ta'zīr* adalah untuk menyadarkan peserta didik dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Oleh karena itu setiap pendidik hendaknya memperhatikan syarat-syarat dalam pemberian hukuman, yaitu :

1. Pemberian hukuman harus tetap dalam jalinan cinta, kasih dan sayang.
2. Harus didasarkan kepada alasan "keharusan".
3. Harus menimbulkan kesan dihati anak.
4. Harus menimbulkan keinsyafan dan penyesalan kepada anak didik.
5. Diikuti dengan pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan.³³

Di dalam dunia pesantren penanaman pendidikan Islam dilakukan secara intensif dimana orientasinya pertama, dunia ke ukhrawi, yaitu menyiapkan santri memiliki bekal-bekal dalam mendalami syariat Islam.

Kedua, membentuk jiwa yang menekankan pada aspek *tazkiyatun an-*

³¹Nur Jamal, "Transformasi Pendidikan Pesantren Dalam Pembentukan Kepribadian Santri," *Tarbiyatuna* 8, 2(2015), 84–85.

³²Azis, *Reward-Punishment Sebagai Motivasi.*, 344.

³³Widayatullah, *Pengaruh Ta'zir Terhadap Peningkatan Kedisiplinan Santri.*, 69.

nafs(penyucian diri). Ketiga, memberikan bekal terhadap santri agar mampu menghadapi tantangan hidup dimasa yang akan datang.³⁴ Dengan demikian dalam menetapkan sebuah kebijakan atau peraturan harus melalui pertimbangan yang matang sebelum diterapkan kepada santri kedepannya.

Dalam dunia pesantren banyak terdapat istilah elemen-elemen utama seperti adanya kyai dan santri. Seorang santri diajarkan berbagai ilmu keagamaan. Selain itu seorang santri diajarkan untuk senantiasa taat dan patuh terhadap guru atau ustadz/ustadzahnya untuk melakukan berbagai perbuatan yang sifatnya ke arah kebaikan agar bisa menjalankan ibadah dengan benar sesuai dengan syariat Islam dan menjadi semakin dekat dengan Tuhannya.

Undang-Undang pesantren pasal 10 ayat 3 menyatakan bahwa baik santri yang bermukim di pesantren atau tidak, diarahkan untuk mendalami dan meningkatkan kajian kitab kuning atau *dirasah Islāmiah* dengan pola pendidikan *mu'allimīn*, pengamalan ibadah, pembentukan perilaku akhlak mulia, dan penguasaan bahasa.³⁵ Oleh karena itu, ketika seseorang telah menyandang predikat sebagai seorang santri tidak sepatutnya jika masih memiliki perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat.

³⁴Tatang Hidayat, "Pola Pendidikan Islam Di Pondok Pesantren Mahasiswa Miftahul Khoir Bandung Dalam Membentuk Kepribadian Islami", *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 7, 1(2018), 358.

³⁵"UU 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren", diakses tanggal 17 Desember 2019.

D. Kepatuhan Santri Dalam Melaksanakan Peraturan di Pondok

Pesantren

Pesantren sebagai salah satu lembaga yang turut serta dalam meningkatkan perkembangan sistem pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari berbagai usahanya demi mencapai visinya. Secara substantif, materi yang dikaji di pondok pesantren adalah ilmu-ilmu agama (fiqih, nahwu, tafsir, hadith, tauhid, dan tasawwuf).

Sumber belajar menggunakan kitab turats dikenal dengan kitab kuning. Materi nahwu (bahasa Arab) dan fiqih mendapat porsi mayoritas. Hal itu dilakukan karena ilmu nahwu merupakan ilmu kunci. Seseorang tidak dapat membaca kitab kuning bila belum menguasai ilmu nahwu. Materi fiqih dipandang sebagai ilmu yang banyak berhubungan dengan kebutuhan masyarakat dan kehidupan sehari-hari baik yang berhubungan dengan makhluk maupun khaliq.

Tidak heran bila sebagian pakar menyebut sistem pendidikan Islam di pesantren bersifat fiqih *oriented* atau nahwu *oriented*. “Penyelenggaraan pendidikan pesantren tidak memiliki kurikulum tertulis. Kiai berperan utama sebagai kurikulum aktual yang mengarahkan program pembelajaran dan seluruh aktivitas santrinya di pesantren. Kurikulum pesantren dapat dikatakan sejalan dengan kehidupan pribadi kiai sebagai pendiri/pemimpin dan pengasuh pesantren.”³⁶

³⁶Yedi Purwanto and Chairil N Siregar, “Pesantren Dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia Pendahuluan Islam Yang Indigenous ‘ Asli ’ Di Indonesia . Pesantren Termasuk Masuk Dalam UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Masih Besar . Angka Partisipasi”, *Jurnal Lektur Keagamaan*, 1(2017), 241.

Dhofier menyatakan di dalam artikel yang ditulis oleh Kemas Mas'ud Ali bahwasanya unsur-unsur dasar yang membentuk lembaga pondok pesantren adalah Kiai, masjid, asrama, santri dan kitab kuning. Unsur ditempatkan pada posisi sentral dalam komunitas pesantren, karena dianggap sebagai pemilik, pengelola dan pengajar kitab kuning sekaligus merangkap imam (pemimpin) pada acara-acara ritual keagamaan, seperti melakukan shalat berjamaah. Sedangkan unsur-unsur lainnya yaitu masjid, asrama, santri dan kitab kuning bersifat subsider yang keberadaannya di bawah kontrol dan pengawasan Kiai. Karakteristik fisik yang membedakan lembaga pondok pesantren dengan lembaga pendidikan di luar pondok pesantren terletak pada unsur tersebut.³⁷

Pada dasarnya, pengasuhan yang dilakukan dalam lingkungan pondok pesantren memiliki berbagai pola tertentu. Dari beberapa referensi dan hasil penelitian terdahulu, kegiatan pengasuhan anak ini memiliki tiga pola, yakni pola otoriter, pola permisif dan pola demokratis.³⁸

Pola asuh yang diterapkan di asrama cenderung bersifat otoriter atau berpusat pada satu figur saja. Melalui gaya pembinaan yang seperti ini diharapkan santri akan patuh dan berkembang kearah yang diharapkan oleh pondok pesantren. Gaya pengasuhan yang otoriter berpengaruh terhadap kondisi santri yang tinggal di pondok pesantren bila dibandingkan dengan pola asuh yang lainnya seperti permisif dan demokratis. Pengaruh yang menonjol salah satunya terhadap kedisiplinan santri untuk mengikuti

³⁷Kemas Mas'ud Ali, "Penerapan Pola Asuh Terhadap Santri Di Pondok Pesantren Al-Amalul Khair Palembang Abstrak", *Tadrib*, 2 (Desember, 2017), 280.

³⁸Ibid., 281.

serangkaian kegiatan pondok pesantren dan menaati peraturan yang berlaku. Strategi untuk mencapai tujuan mendisiplinkan santri antara lain melalui keteladanan pengasuhnya melalui nasehat-nasehat, bimbingan dan *ta'zīr* (hukuman).